

Implementasi Kurikulum Merdeka pada SMP Negeri 1 Karangtanjung Kabupaten Pandeglang

Rozikin¹, Kandung Sapto Nugroho²

¹Program Magister Administrasi Bisnis, STIA Banten

²FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ptronazemhasejahtera1@gmail.com , bimbingankandungs23@gmail.com

Corresponding author: ptronazemhasejahtera1@gmail.com

Submitted: 25/07/2025; Revised: 05/08/2025; Published: 19/08/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.373>

Abstract

This study aims to examine the process of implementing the Merdeka Curriculum at SMP Negeri 1 Karangtanjung, to identify the challenges faced by teachers and the school in its implementation, as well as the strategies applied to overcome these challenges in order to improve the quality of learning. The research method used is qualitative with an in-depth interview approach involving various key informants, such as the principal, the vice principal in charge of curriculum, cross-subject teachers, administrative staff, the school committee, and school supervisors. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum is carried out collaboratively and in a structured manner with the principal playing a central role in facilitating training, coordination, and supervision. However, there are several main challenges including teacher readiness and adaptation, limited facilities and infrastructure, administrative obstacles, and a shift in school culture. Several strategies have been implemented, including enhancing teacher capacity through continuous training, improving coordination among stakeholders, simplifying administration, and strengthening an adaptive work culture. Synergistic implementation among school stakeholders is considered crucial in improving the quality of learning in accordance with the values of the Profile of Pancasila Students.

Keywords: *Merdeka Curriculum, educational policy implementation, teacher collaboration, Profile of Pancasila Students, implementation challenges*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dan sekolah dalam pelaksanaannya, serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan mutu pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam terhadap berbagai informan kunci, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru lintas mata pelajaran, staf tata usaha, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berjalan secara kolaboratif dan terstruktur dengan peran sentral kepala sekolah dalam memfasilitasi pelatihan, koordinasi, dan supervisi. Namun, terdapat berbagai kendala utama seperti kesiapan dan adaptasi guru, keterbatasan sarana prasarana, hambatan administratif, serta

perubahan budaya sekolah. Berbagai strategi telah diterapkan, antara lain peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi antar pihak, penyederhanaan administrasi, dan penguatan budaya kerja yang adaptif. Implementasi yang sinergis antar pemangku kepentingan di sekolah dinilai krusial untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang sesuai dengan nilai Profil Pelajar Pancasila.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, implementasi kebijakan pendidikan, kolaborasi guru, Profil Pelajar Pancasila, kendala pelaksanaan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana yang bertujuan membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi individu agar menjadi manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berkarakter. Selain sebagai transfer ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian dan integritas moral peserta didik, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan definisi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa pendidikan adalah usaha untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensi spiritual, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Di era dinamika global yang diwarnai perkembangan teknologi, tuntutan dunia kerja, dan perubahan sosial budaya, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dalam konteks tersebut, Kurikulum Merdeka hadir sebagai sebuah paradigma baru yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan memberikan otonomi kepada satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan konteks lokal. Kurikulum ini diterapkan pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, termasuk pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di mana pembelajaran difokuskan pada fase D (kelas VII sampai IX) melalui kombinasi pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan pihak sekolah, guru, murid, dan orang tua. Sekolah dituntut menyiapkan sarana dan prasarana serta manajemen yang mampu beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek. Guru perlu meningkatkan kapasitas pengembangan bahan ajar serta mengelola perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas. Murid harus mengembangkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang menjadi fokus pembelajaran. Di sisi lain, orang tua perlu mendapatkan pemahaman dan dukungan agar mereka dapat berperan aktif dalam mendampingi proses belajar anak di rumah.

Kurikulum Merdeka merupakan sebuah paradigma baru dalam sistem pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan untuk menggantikan pendekatan kurikulum sebelumnya yang lebih terpusat dan kaku. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Definisi Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mengutamakan otonomi bagi sekolah untuk menentukan metode pengajaran, materi ajar, dan cara evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan serta konteks spesifik masing-masing satuan (Kemendikbud, 2022). Prinsip utama dari Kurikulum Merdeka meliputi kebebasan dalam memilih materi ajar yang relevan, pengembangan kompetensi dasar yang mendalam, serta penekanan pada penguatan karakter dan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan siswa. Dalam implementasinya, Kurikulum Merdeka memberi kesempatan kepada guru untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta mengurangi beban administratif yang sering menghambat kualitas pengajaran (Kemendikbud, 2022).

Perbedaan mendasar antara Kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat terletak pada tingkat fleksibilitas dan otonomi yang diberikan. Kurikulum 2013, yang sebelumnya menjadi standar nasional, lebih bersifat terpusat dengan pedoman yang ketat mengenai standar kompetensi dan materi ajar. Di sisi lain, Kurikulum Darurat diimplementasikan dalam situasi tertentu seperti pandemi COVID-19, dengan fokus pada pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian cepat

terhadap kondisi darurat. Kurikulum Merdeka, dengan prinsip otonominya, bertujuan untuk mengatasi kekakuan tersebut dengan memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk mengatur dan menyesuaikan proses pembelajaran secara lebih fleksibel dan kontekstual (Agung, 2020).

Dalam praktiknya, Merdeka Belajar diterjemahkan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penghapusan ujian nasional sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, pemberian otonomi kepada sekolah untuk menentukan kurikulum lokal, serta pengembangan berbagai bentuk penilaian yang lebih holistik dan tidak hanya bergantung pada tes standar. Pendekatan ini juga mencakup penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran digital yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka lebih dalam.

Merdeka belajar memiliki tujuan diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
- b. Meningkatkan Keterlibatan dan Kreativitas Siswa: Dengan memberikan kebebasan dalam cara belajar dan mengeksplorasi minat, Merdeka Belajar berupaya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
- c. Meningkatkan Kualitas Guru: Memberikan otonomi kepada guru untuk mengembangkan metode dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran.

Pelaksanaan Merdeka Belajar juga memiliki prinsip dalam menjalakkannya, diantaranya adalah:

- a. Kebebasan dan Otonomi: Sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik (Sabriadi HR, 2021).
- b. Fleksibilitas dalam Pembelajaran: Menerima berbagai bentuk pembelajaran dan penilaian, tidak hanya berfokus pada tes standar tetapi juga pada kompetensi dan keterampilan praktis (Direktor Jendral, 2020).

- c. PEMBERDAYAAN SISWA: Mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa memiliki peran aktif dalam menentukan apa dan bagaimana mereka belajar.

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari Kurikulum Merdeka:

- a. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran: Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan otonomi lebih besar kepada guru dan sekolah dalam menentukan metode pengajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal (Kemendikbud, 2022).
- b. Mengembangkan Kreativitas dan Kemandirian Siswa: Salah satu tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan memberikan kebebasan lebih besar dalam pembelajaran, siswa didorong untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan mereka.
- c. Mengurangi Beban Administratif Guru: Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk mengurangi beban administratif guru dengan memberikan fleksibilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada proses pengajaran dan pembelajaran, serta pengembangan profesional mereka (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2020).
- d. Meningkatkan Relevansi Pendidikan: Dengan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berkembang (Syahrir., 2020).
- e. Meningkatkan Partisipasi dan Keterlibatan Siswa: Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang lebih partisipatif dan interaktif, dimana siswa memiliki peran yang

lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar (Sabriadi HR, 2021).

- f. Menyiapkan Siswa untuk Masa Depan: Dengan fokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan dan menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab (Kemendikbud, 2022).

Dengan tujuan-tujuan ini, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan bermakna bagi semua peserta didik.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, implementasi memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, diferensiasi pembelajaran, dan kebebasan belajar yang lebih luas bagi peserta didik serta keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Kemendikbudristek, 2022), bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan ruang bagi pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara utuh melalui pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pembelajaran yang fleksibel dan inklusif.

“Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta mengedepankan pembelajaran yang mendalam, tidak terburu-buru mengejar ketuntasan materi.” (Kemendikbudristek, 2022)

Implementasi kurikulum di tingkat sekolah juga harus dilihat sebagai proses adaptif, yang memerlukan kesiapan aktor-aktor utama seperti kepala sekolah, guru, hingga pengawas pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Fulla (2007) dalam Ansyar, 2015) bahwa implementasi kurikulum merupakan sebuah proses perubahan yang kompleks, yang dipengaruhi oleh pemahaman, motivasi, serta kapasitas individu dan institusi dalam menjalankan perubahan tersebut.

“Change is a process, not an event, and implementation requires a clear understanding of the new program, a strong commitment, and supportive leadership and infrastructure.”. (Fullan, 2007), p. 84.

Implementasi kurikulum bukanlah sebuah proses tunggal, melainkan mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum di lapangan. Dalam literatur pendidikan, beberapa ahli mengidentifikasi dimensi-dimensi utama dalam implementasi kurikulum, antara lain: dimensi kontekstual, struktural, proses, dan hasil (Nieveen, 2002).

1. Dimensi Kontekstual

Dimensi ini mencakup latar belakang sosial, budaya, geografis, dan ekonomi tempat kurikulum diterapkan. Dalam konteks SMP Negeri 1 Karang Tanjung sebagai Sekolah Penggerak, faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan pemangku kepentingan (stakeholder), serta kondisi sosial masyarakat Pandeglang sangat berpengaruh terhadap proses adaptasi Kurikulum Merdeka.

“The context in which a curriculum is implemented includes the environment, policies, and social conditions that affect teaching and learning” (Print, 1993).

2. Dimensi Struktural

Ini berkaitan dengan elemen-elemen formal dari kurikulum seperti struktur kurikulum, alokasi waktu, pembagian mata pelajaran, serta dukungan administratif. Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan bagi sekolah untuk merancang program intrakurikuler dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang menuntut kesiapan struktur organisasi sekolah. Keleluasaan ini seringkali memerlukan penyesuaian terhadap struktur kerja guru, sistem penilaian, dan perencanaan pembelajaran.

3. Dimensi Proses

Dimensi ini melibatkan strategi pembelajaran, metode, dan interaksi guru-siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum Merdeka menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih student-centered serta penguatan pada pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Artinya, guru perlu memiliki kompetensi pedagogik yang tinggi serta kemampuan untuk merespons kebutuhan belajar siswa secara individual.

“Curriculum implementation is most visible at the classroom level, where the interaction between teachers and students occurs” (Nieveen, 2002).

4. Dimensi Hasil (*Outcome*)

Merujuk pada pencapaian hasil belajar siswa, baik dalam bentuk kompetensi akademik maupun karakter. Kurikulum Merdeka mengukur hasil tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga dari ketercapaian Profil Pelajar Pancasila yang meliputi nilai-nilai seperti gotong royong, kebhinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan beriman/bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dimensi hasil ini memerlukan instrumen evaluasi yang lebih holistik dan kontekstual.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyasa, keberhasilan implementasi kurikulum tidak semata ditentukan oleh kualitas dokumen kurikulum itu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana kurikulum tersebut dihidupkan melalui tindakan nyata dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami implementasi kurikulum sebagai suatu proses multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sekolah. Berikut adalah dimensi-dimensi utama yang dapat dijadikan dasar:

1. Dimensi Kontekstual

Dimensi ini meliputi latar belakang sosial, budaya, geografis, ekonomi, dan kebijakan pendidikan di lingkungan sekolah yang memengaruhi cara kurikulum diimplementasikan. Menurut Mulyasa, keberhasilan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya sekolah, termasuk kesiapan dan dukungan masyarakat.

“Kondisi lingkungan sekolah, masyarakat, dan kebijakan yang berlaku sangat memengaruhi proses implementasi kurikulum. Setiap sekolah memiliki konteks yang berbeda, sehingga implementasi kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.” (Mulyasa, 2022).

2. Dimensi Personal (Kapasitas Guru)

Merujuk pada kompetensi, pemahaman, dan sikap guru dalam melaksanakan kurikulum. Mulyasa menekankan bahwa guru adalah pelaksana utama kurikulum.

Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada pemahaman guru terhadap isi kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian.

“Guru sebagai pelaksana utama kurikulum harus memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai untuk menafsirkan dan menerjemahkan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran.” (Mulyasa, 2022).

3. Dimensi Proses Pembelajaran

Berisi aktivitas nyata dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam proses belajar mengajar, termasuk strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Menurut Nieveen & Kuiper (2002), dimensi proses adalah jantung dari implementasi kurikulum, karena di sinilah interaksi langsung antara guru dan siswa terjadi.

“Curriculum implementation is most visible at the classroom level where learning activities take place and teachers interact with students.” (Nieveen, 2002).

4. Dimensi Organisasi dan Manajemen

Melibatkan peran manajerial kepala sekolah, struktur organisasi, perencanaan sekolah, serta dukungan administrasi pendidikan. Mulyasa, menyebut bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan tata kelola pendidikan merupakan kunci dalam menjamin implementasi kurikulum berjalan secara sistematis.

“Kepemimpinan kepala sekolah yang profesional serta manajemen sekolah yang efektif akan mempengaruhi secara langsung keberhasilan pelaksanaan kurikulum.” (Mulyasa, 2022).

5. Dimensi Evaluasi dan Penilaian

Mengacu pada bagaimana penilaian hasil belajar siswa dilakukan untuk memastikan tujuan kurikulum tercapai. Mulyasa menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi, karena memberikan umpan balik yang penting dalam pengambilan keputusan pendidikan.

“Evaluasi merupakan alat pengendali untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kurikulum dan memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran” (Mulyasa, 2022).

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan, karena menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan adalah model dari George C. Edward III. Yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi menjadi elemen penting agar pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dilakukan. Jika kebijakan tidak dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran, maka kebijakan tersebut berpotensi disalahartikan oleh pelaksana. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, komunikasi yang intensif antara Kementerian Pendidikan dengan satuan pendidikan sangat penting agar transformasi pembelajaran berjalan sesuai arah kebijakan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia (guru, kepala sekolah), keuangan, fasilitas, maupun informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan akan sulit diterapkan dengan efektif. Sekolah Penggerak memerlukan guru-guru yang sudah dilatih dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar Kurikulum Merdeka dapat berjalan optimal.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition/Attitudes*)

Ini merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan. Jika pelaksana (dalam hal ini guru dan kepala sekolah) tidak memiliki kemauan dan semangat untuk menjalankan kebijakan, maka proses implementasi akan terhambat. Edward III menekankan pentingnya loyalitas dan kesiapan pelaksana dalam menerapkan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi yang mendukung akan mempermudah proses implementasi. Mekanisme kerja yang jelas, pembagian peran, serta koordinasi antar lembaga

merupakan bagian penting dari struktur birokrasi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, struktur organisasi sekolah serta peran dinas pendidikan sangat menentukan keberhasilan implementasinya.

Dengan keempat dimensi ini, Edward III memberikan kerangka yang sistematis untuk menganalisis mengapa suatu kebijakan dapat atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka diimplementasikan di SMP Negeri 1 Karang Tanjung sebagai salah satu Sekolah Penggerak di Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang diterapkan sekolah dan guru untuk mengatasi hambatan tersebut demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik nyata transformasi pendidikan di tingkat SMP pada wilayah Kabupaten Pandeglang, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di masa mendatang.\

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung Kabupaten Pandeglang telah berlangsung sejak sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah penggerak, salah satu pionir yang melaksanakan kurikulum ini secara aktif dan terstruktur. Penelitian khusus terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas VII D, menunjukkan bahwa proses implementasi mencakup tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian/evaluasi.

Pada tahap perencanaan, guru melakukan analisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, mengembangkan alur tujuan pembelajaran, serta merancang modul ajar berdasarkan hasil tes diagnostik siswa. Tahap pelaksanaan menitikberatkan pada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dengan metode dan materi yang bersifat lebih esensial dan kontekstual. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan melalui raport hasil belajar yang disusun berdasarkan aktivitas pembelajaran dan proyek yang dijalankan siswa.

Selain itu, SMP Negeri 1 Karangtanjung aktif melakukan pengembangan tenaga pendidik melalui program guru penggerak dan berbagi praktik baik dengan sekolah lain maupun dinas pendidikan. Kepala sekolah berperan penting dalam memotivasi guru dan siswa untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kurikulum baru, serta menjalin koordinasi yang baik antar guru, dengan kepala sekolah, dinas pendidikan, pendamping ahli, dan orang tua siswa untuk mengatasi kendala yang muncul.

Pembelajaran di SMP Negeri 1 Karangtanjung juga menekankan pengembangan karakter dan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri, melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan proyek-proyek pembelajaran yang menantang. Penilaian dilakukan secara holistik, tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sehingga siswa dapat menunjukkan berbagai kemampuan mereka secara menyeluruh.

Dengan penerapan Kurikulum Merdeka, siswa di SMP Negeri 1 Karangtanjung mengalami peningkatan motivasi, minat belajar, dan kreativitas. Pembelajaran kolaboratif dan kerja kelompok memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi ide dan pengetahuan, meningkatkan keterlibatan dan kemampuan sosial mereka. Hal ini tentu berdampak positif pada kualitas hasil belajar dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung berhasil meningkatkan mutu pembelajaran melalui pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat pada siswa, didukung oleh kepemimpinan sekolah yang kuat serta kolaborasi berbagai pihak terkait.

Namun SMP Negeri 1 Karangtanjung sebagai salah satu Sekolah Penggerak angkatan pertama di Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2021 menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, pada hari Kamis, 19 Juni 2025, terungkap kendala utama yang dihadapi meliputi:

1. Kendala dari sisi siswa, seperti belum maksimalnya kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi dan gadget secara efektif untuk mendukung pembelajaran,

- serta masih perlu peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.
2. Kendala dari sisi guru, terutama dalam adaptasi terhadap paradigma pembelajaran baru yang menuntut penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Guru-guru masih dalam proses meningkatkan kompetensi dan pemahaman kurikulum baru, serta menghadapi tantangan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai.
 3. Keterbatasan sosialisasi dan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, pendamping ahli, dan orang tua siswa sehingga proses implementasi belum sepenuhnya optimal.
 4. Kendala teknis dan sumber daya, seperti keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran digital dan akses teknologi yang belum merata di kalangan siswa.
 5. Dukungan eksternal yang belum merata, termasuk partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung berbagai proyek pembelajaran yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka.

Meski demikian, SMP Negeri 1 Karangtanjung mampu mengatasi sebagian kendala tersebut melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru, pemerintah, pendamping ahli, dan orang tua siswa. Sekolah juga aktif melakukan diseminasi dan berbagi pengalaman implementasi Kurikulum Merdeka dengan sekolah lain di Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan keberhasilan pelaksanaan program.

Kendala-kendala ini merupakan bagian dari dinamika transformasi sekolah yang wajar dalam proses adaptasi terhadap inovasi pendidikan, dan menjadi fokus perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Karangtanjung.

Dalam penelitian ini, pendekatan implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karang Tanjung dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip implementasi menurut Mulyasa, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan program Sekolah Penggerak. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana

sekolah mampu mewujudkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka ke dalam praktik pembelajaran yang bermakna dan adaptif terhadap karakteristik siswa dan konteks lokal.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kurikulum menjadi salah satu instrumen utama yang mengarahkan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Namun, sebuah kurikulum tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif dalam praktik pembelajaran.

Implementasi kurikulum merupakan tahap krusial yang menjembatani antara rancangan kurikulum yang bersifat konseptual dengan realitas pelaksanaan di kelas. Proses ini tidak hanya menuntut pemahaman guru terhadap isi kurikulum, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya, dukungan manajemen sekolah, serta keterlibatan berbagai pihak dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks perubahan paradigma pendidikan melalui Kurikulum Merdeka, implementasi menjadi semakin kompleks karena menuntut perubahan pola pikir, strategi pembelajaran, dan model evaluasi yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

Dimensi-dimensi ini menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka dijalankan di tingkat sekolah. Dalam penelitian ini, kelima dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara efektif di SMP Negeri 1 Karang Tanjung, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam setiap dimensi tersebut.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan dinamika dan kompleksitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, terutama terkait dimensi disposisi, struktur birokrasi, koordinasi antar pihak, serta kolaborasi antarguru dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Secara keseluruhan, jawaban para informan menegaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis dan sumber daya, tetapi

juga sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis, struktural, dan sosial organisasi sekolah. Pada dimensi disposisi, motivasi dan kesiapan guru serta tenaga kependidikan menjadi faktor kunci yang mendorong inovasi dan perubahan pola pembelajaran. Tingkat kesiapan yang bervariasi dan tantangan dalam perubahan pola pikir guru menjadi penghambat utama yang harus diatasi dengan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas.

Dimensi struktur birokrasi dan organisasi menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran sentral sebagai penggerak, fasilitator, dan supervisor yang menciptakan iklim kondusif bagi penerapan kurikulum. Mekanisme kerja yang melibatkan koordinasi rutin antara sekolah, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memperlihatkan tata kelola yang terstruktur dan kolaboratif. Meski demikian, tantangan seperti efisiensi administrasi, kecepatan komunikasi, serta keberlanjutan koordinasi masih menjadi ruang perbaikan agar birokrasi lebih responsif dan proaktif.

Kolaborasi antarguru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila juga berjalan dengan baik, terutama difasilitasi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kerja sama lintas mata pelajaran dan pembentukan komunitas belajar guru menjadikan integrasi karakter dan kompetensi akademik semakin nyata dan berkelanjutan. Namun, beban kerja guru dan tantangan kontinuitas kolaborasi perlu mendapat perhatian agar budaya kerja sama terus berkembang dan memberikan dampak yang optimal pada pengembangan siswa.

Interpretasi hasil ini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat dilepaskan dari konteks spesifik sekolah, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, dukungan kebijakan, dan budaya organisasi sekolah. Hubungan timbal balik antara faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang dapat mempercepat atau menghambat transformasi pembelajaran.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa penguatan aspek struktural dan budaya organisasi serta peningkatan kapasitas SDM menjadi prasyarat penting agar prinsip pembelajaran yang mengutamakan kemerdekaan, kreativitas, dan

Profil Pelajar Pancasila dapat diwujudkan secara nyata. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin visioner, komunikator, dan fasilitator menjadi ujung tombak keberhasilan transformasi ini.

Sebagai catatan reflektif, meskipun sudah banyak aspek positif yang teridentifikasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara kebijakan kurikulum dan realisasi di lapangan, terutama terkait kesiapan teknologi dan keterbatasan waktu kolaborasi guru. Oleh karena itu, interpretasi ini menjadi pijakan penting untuk merancang intervensi, pembinaan, dan kebijakan yang lebih adaptif dan holistik di masa mendatang.

Dengan demikian, interpretasi hasil penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan kajian mengenai motivasi, struktur, kolaborasi, dan peran kepemimpinan dalam Kurikulum Merdeka, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi pelaksanaan kurikulum dan penguatan Profil Pelajar Pancasila yang kontekstual di lingkungan sekolah.

Pada bagian ini akan disajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses penelitian. Hasil yang dipaparkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai data dan informasi yang terkumpul sehingga dapat mendukung analisis serta pembahasan lebih lanjut.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, bagian ini akan memaparkan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh secara sistematis. Paparan hasil ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Dengan demikian, temuan yang disajikan diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti, maka dapat dijawab sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung berlangsung melalui proses yang melibatkan berbagai unsur manajemen sekolah, guru, staf administrasi, dan pengawas, dengan berbagai dinamika, tantangan, serta upaya inovasi untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran.
- b. Kesiapan dan Motivasi Guru serta Pelaksana

Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah dan para guru, proses implementasi dimulai dengan peningkatan kesiapan guru, yang menjadi ujung tombak perubahan pembelajaran. Kepala sekolah berperan aktif sebagai motivator dan fasilitator, mengarahkan guru untuk memahami konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Namun, kesiapan guru masih beragam; beberapa guru perlu waktu dan dukungan lebih untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik.

Guru-guru melaporkan upaya kolaborasi yang intens dalam merancang pembelajaran, terutama untuk mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Diskusi dan pertemuan rutin antar guru bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, dan PJOK menunjukkan adanya kerja sama lintas disiplin yang bertujuan memadukan aspek akademik dan pengembangan karakter secara holistik.

c. Mekanisme Struktur Birokrasi dan Koordinasi

Pada aspek birokrasi, kepala sekolah dan wakilnya mengelola proses koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, komite sekolah, serta staf tata usaha. Koordinasi rutin dilakukan lewat rapat, pelaporan, dan monitoring yang sistematis. Komite sekolah turut serta sebagai mitra strategis yang memberikan dukungan pendanaan dan pengawasan secara langsung.

Staf tata usaha memainkan peran penting demi kelancaran administrasi, pengelolaan dokumen, serta pencairan dana yang mendukung kebutuhan pelatihan dan pengembangan media pembelajaran. Sementara itu, pengawas sekolah mengawasi dan mengevaluasi kelangsungan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

d. Tantangan dan Upaya Penguatan

Sejumlah tantangan signifikan dihadapi, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, adaptasi guru terhadap pendekatan pembelajaran baru, serta beban administratif yang masih berat bagi staf tata usaha. Keterbatasan fasilitas teknologi juga mempengaruhi penerapan pembelajaran berbasis proyek yang kreatif dan interaktif.

Perubahan pola pikir guru dalam mengadopsi pembelajaran yang memberikan ruang lebih bagi kemandirian dan kreativitas peserta didik membutuhkan waktu, pelatihan aplikatif, dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar proses pelaksanaan semakin terarah dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa proses implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung merupakan rangkaian kegiatan yang berfokus pada perubahan paradigma pembelajaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan masyarakat sekolah. Proses ini diawali dengan pemahaman dan sosialisasi intensif terhadap capaian pembelajaran dan prinsip utama Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek.

Secara operasional, implementasi diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi, termasuk Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, dan rencana asesmen. Guru-guru di SMP Negeri 1 Karangtanjung berperan aktif melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan capaian kurikulum. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan metode yang mendorong keterlibatan aktif siswa, kolaborasi antar guru dari berbagai mata pelajaran, serta evaluasi berkelanjutan menggunakan berbagai jenis asesmen, termasuk asesmen diagnostik, formatif, sumatif, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana diatur dalam Kurikulum Merdeka.

Teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dikenal luas dan sering dijadikan rujukan dalam penelitian kebijakan pendidikan, termasuk dalam konteks Kurikulum Merdeka. Pengembangan teori George Edward III berfokus pada empat variabel utama yang saling terkait dan saling memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Kejelasan, konsistensi, dan efektivitas penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana sangat menentukan terlaksananya kebijakan di lapangan. Jika komunikasi tidak berjalan baik, akan terjadi distorsi atau mispersepsi sehingga kebijakan tidak diimplementasikan secara utuh.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Meliputi ketersediaan SDM, dana, sarana prasarana, serta kewenangan otoritas yang memadai. Kebijakan yang baik akan gagal diimplementasikan apabila sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak cukup.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana (*Disposition/Attitude*)

Sikap dan komitmen para pelaksana sangat memengaruhi efektivitas implementasi. Sikap positif, dukungan, dan kepercayaan pelaksana terhadap kebijakan mendorong pelaksanaan yang optimal, sedangkan resistensi atau ketidakpahaman dapat menjadi hambatan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Organisasi pelaksana kebijakan harus memiliki struktur yang jelas, prosedur yang efektif, serta mekanisme pengawasan yang baik agar seluruh proses implementasi berjalan secara terkoordinasi dan terpantau.

Pengembangan dari teori ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan (termasuk dalam pendidikan seperti Kurikulum Merdeka) tidak hanya bergantung pada dokumen atau desain kebijakannya saja, melainkan pada proses interaksi dan keseimbangan antara komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara simultan. Teori ini juga menempatkan pentingnya respons dan adaptasi pelaksana di lapangan, sehingga dalam pengembangan lebih lanjut, teori Edward III menjadi dasar analisis implementasi yang dinamis: tidak bersifat satu arah (top-down) saja, melainkan juga memperhatikan tantangan kontekstual dan interaksi berbagai aktor di tingkat lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan di SMP Negeri 1 Karangtanjung serta interpretasi temuan, kesimpulan terkait tiga rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung berjalan melalui proses yang melibatkan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru lintas mata pelajaran, staf tata usaha, komite sekolah, hingga pengawas sekolah. Kepala sekolah memegang peran strategis sebagai motivator dan fasilitator, memastikan kesiapan guru dengan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi yang terjalin dengan Dinas Pendidikan dan komite sekolah berjalan rutin dan terorganisir. Kolaborasi antarguru dalam merancang pembelajaran sesuai Profil Pelajar Pancasila terbentuk melalui komunitas belajar dan pertemuan rutin lintas disiplin yang mendorong integrasi nilai karakter dan kompetensi akademik secara holistik.

2. Kendala yang Dihadapi Guru dan Sekolah dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan kurikulum, yaitu: kesiapan dan adaptasi sumber daya manusia khususnya guru yang memerlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan; keterbatasan sarana dan prasarana, terutama fasilitas teknologi pembelajaran digital; hambatan dalam administrasi dan pengelolaan anggaran yang masih rumit dan memakan waktu; ketimpangan kualitas antara sekolah di wilayah berbeda; serta perubahan budaya dan pola pikir di lingkungan sekolah yang memerlukan waktu dan pembiasaan guna menginternalisasi prinsip pembelajaran berpusat pada siswa. Beban kerja guru yang semakin bertambah juga menjadi tantangan dalam mempertahankan konsistensi inovasi pembelajaran.

3. Strategi yang Diterapkan untuk Mengatasi Kendala dan Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Berbagai strategi diimplementasikan untuk mengatasi kendala tersebut, di antaranya: penguatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan;

peningkatan koordinasi dan komunikasi rutinitas antara sekolah, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan pengawas; pengelolaan sumber daya secara efisien dengan dukungan administrasi tata usaha yang tertib; penyederhanaan proses administrasi untuk mengurangi beban guru; pengembangan dan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai; serta penguatan budaya kerja dan mindset pendidikan yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif sebagai bagian integral proses pembelajaran.

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Karangtanjung sangat bergantung pada sinergi antara faktor manusia, struktur organisasi, dukungan sumber daya, serta pengelolaan yang adaptif dan inovatif untuk mengatasi hambatan yang ada dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran berkarakter sesuai Profil Pelajar Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. (2020). *Strategi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid 19*. Singaraja: : Undiksha Press. .
- Amri, S. d. (2010). *Konstruksi Pengembangan Pembelajaran Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Dan Praktik Kurikulum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arifin, Z. (2018). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Rosda Karya,.
- Burke, J. W. (2005). *Reinventing Assessment: Speculations on the Future of Large Scale Educational Testing*. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: : Congressional Quarterly Press.
- Fulla (2007) dalam Ansyar, M. (2015). *Implementasi Kurikulum: Perubahan Sikap dan Nilai Guru*.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change (4th ed.)*. New York: Teachers College Press.

- Harden, R. M. (2002). Developments in Outcome-based Education. *Medical Teacher*, 24(2), 117–120. DOI: 10.1080/0142159022020687.
- Izza, A. z. (2020). Problematika Evaluasi Pembelajaran dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Pekalongan*.
- Junaedi, M. (2020). *Ilmu Pendidikan Islam Filsafat dan Pengembangan*. Semarang: Rasail.
- Kemendikbud. (2022). *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Link: <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>.
- Makarim, N. (2021). *Get to Know About KURIKULUM MERDEKA*. Surabaya: Suara Surabaya.
- Mulyasa, E. (2022). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nieveen, N. &. (2002). *Curriculum Implementation in the Netherlands*. Enschede: : SLO (Netherlands Institute for Curriculum Development).
- Nurmadiyah. (2016). Manajemen Sarana dan Prasarana. *Jurnal Al-Afkar Vol. VI. No. 1, .*
- OECD. (2005). *The Definition and Selection of Key Competencies (DeSeCo)*. Paris: OECD Publishing.
- Ornstein, A. C. (2018). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th ed.)*. Pearson Education.
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. Sydney: : Allen & Unwin.
- Sabriadi HR, d. N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 11, no. 2 (17 Agustus 2021)*, 175-184.
- Sherly, D. &. (2020). Merdeka belajar: kajian literatur- Konferensi Nasional Pendidikan I. 182-190.

- Siskawati, F. S. (2020). PROFIL KEMAMPUAN LITERASI NUMERASIDI MASA PANDEMI COVID-19. https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/Prosiding_KoPeN/article/view/1673/866.
- Spady, W. G. (1994). *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers* Arlington, VA: American Association of School Administrators.
- Spencer, L. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Suyanto. (2019). *Revitalisasi Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syahrir, M. Y. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar Telaah Metode Pembelajaran Universitas Pendidikan Mandalika Jurnal Ilmiah Mandala Education. *Jurnal ilmiah.mandalaeducation*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index> terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019). Vol. 6. No. 1. April 2020.
- Syahrir., M. Y. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar Telaah Metode Pembelajaran Universitas Pendidikan Mandalika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education: Jurnal ilmiah.mandalaeducation*, Vol. 6. No. 1. April 2020., <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index> <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index> terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019).
- Trilling, B. &. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey-Bass.